



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN
URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Bekasi Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi yang semula telah diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 dalam pelaksanaannya perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perubahannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negera Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PARATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan sebagian Kewenangan untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Nomor Urut 27 Tentang Izin Usaha Pasar Modern dengan Luas kurang dari 2000 Meter, dihapus;
2. Ketentuan Lampiran I Nomor Urut 67 Tentang Izin Toko Swalayan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum di Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini;
3. Ketentuan Lampiran I Nomor Urut 73 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum di Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini;
4. Ketentuan Lampiran II Nomor Urut 4 tentang pemakaian kekayaan daerah (fasus perumahan), dihapus;
5. Ketentuan Lampiran II Nomor Urut 53 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum di Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini;
6. Ketentuan Lampiran II Nomor Urut 6 Tentang Izin Undang-undang Gangguan (HO), dihapus;
7. Ketentuan Lampiran II Nomor Urut 7 Tentang Surat Izin Tempat Usaha (situ), dihapus;
8. Peraturan Bupati ini merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan sebagian Kewenangan untuk Menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 Agustus 2017


BUPATI BEKASI


Hj. NENENG HASANAH YASIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 35 Tahun 2017

TANGGAL : 29 Agustus 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, NON
 PERIZINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN
 KEWENANGAN UNTUK MENANGANI SEBAGIAN
 URUSAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

PELIMPAHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

NO	JENIS NON PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN	
				SKPD	BUPATI/WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
1	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
3	Rekomendasi Pemasangan Lampu PJU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
4	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	-
5	Tanda Daftar Petunjuk Penggunaan Kartu Jaminan/Garansi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
6	Tanda Daftar Gudang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
7	Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
8	Pendaftaran Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-
9	Rekomendasi import barang/peralatan dengan fasilitas OB 23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
10	Rekomendasi survey clearance survey udara	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
11	Pengesahan AMDAL bagi perusahaan wajib AMDAL, RKL, RPL, UKL ataupun UPL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
12	Rekomendasi kelaikan pabrik zat asam dan asitelin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
13	Surat keterangan asal barang/Certivicate Origin (CO)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
14	Rekomendasi angka pengenaan impot	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	-
15	Rekomendasi penyelenggaraan parkir dan izin parkir didalam lingkungan pasar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	-

NO	JENIS NON PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN	
				SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
16	Rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	-
17	Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STVW)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	-
18	Rekomendasi penyelenggaraan parkir diluar badan jalan (off street)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-
19	Rekomendasi analisis dampak lalu lintas (ANDALLALIN)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-
20	Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-
21	Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-
22	Rekomendasi penerbitan usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PPA)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	-
23	Rekomendasi pendirian pusat jasa titipan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	-
24	Rekomendasi izin penyelenggaraan jaringan tertutup lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	-
25	Rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	-
26	Saran teknis mendirikan bangunan Menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	-
27	Rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	-
28	rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	-
29	rekomendasi perizinan pendirian radio siaran TV dan stasiun relay	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	-
30	Rekomendasi PIL banjir	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
31	Aspek Tata Guna Lahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-
32	Master Plan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-
33	Advice Planning	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-

NO	JENIS NON PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN	
				SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
34	Peta Bidang Tanah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-
35	Block Plan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-
36	Pengesahan Site Plan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-
37	Pemberian Saran teknis Izin Mendirikan Bangunan baru, kecuali Saran Teknis IMB Rumah Tinggal Tunggal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-
38	Sertifikasi Laik Fungsi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-
39	Penerbitan Kartu Pennaggungjawab Teknik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-
40	Rekomendasi izin usaha jasa kontruksi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-
41	Saran teknis bangunan khusus (Hotel, kondominium, apartemen, rumah susun)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-
42	Site Plan kapling rumah tinggal perumahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-
43	rekomendasi pertimbangan pemanfaatan daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
44	rekomendasi pembangunan,pemanfaatan,pengeubahan,dan/atau pembongkaran bangunan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
45	rekomendasi atas penyediaan,peruntukan,penggunaan dan pengusahaan sumber daya air	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
46	rekomendasi untuk mendirikan, mengubah, membongkar yang ada diatas maupun yang melintasi saluran irigasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
47	rekomendasi untuk pembangunan,pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air yang terletak dalam wilayah kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
48	rekomendasi atas penyediaan ,peruntukan,penggunaan dan pengusahaan sumber daya air kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-
49	Penetapan Izin Lokasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
50	Pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang permukiman	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-

NO	JENIS NON PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN	
				SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
51	Saran Teknis Bangunan Stata Title	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
52	Saran teknis izin layak huni	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
53	Penggunaan Tanah fasos/fasum perumahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
54	Serah terima sarana, prasarana dan utilitas perumahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
55	S.K nama jalan untuk kawasan perumahan dan kawasan industri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
56	Rekomdasi Pemecahan IMB induk perumahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-
57	Rekomendasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-
58	Akte pengawasan dan wajib lapor ketenagakerjaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-
59	Izin Mempekerjakan Tenaga Warga Negara Asing (IMTA)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-
60	Rekomendasi pendaftaran dan perjanjian kontrak kerja.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-
61	Rekomendasi katering, poliklinik dan dokter unit perusahaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-
62	Rekomendasi paspor tenaga kerja Indonesia (TKI) di wilayah berdasarkan asal/alamat calon tenaga kerja indonesia(TK)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-
63	rekomenadasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan serta bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-
64	rekomenadasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/jib fair	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-
65	perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-
66	rekomenadasi izin operasional tenaga kerja sukarela (TKS) luar negeri, TKS Indonesia , lembaga sukarela indonesia	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-

NO	JENIS NON PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENyiAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN	
				SKPD	BUPATI/WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
67	pencabutan izin operasinal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	-
68	Rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-
69	Rekomendasi hasil penilaian akreditasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-
70	Rekomendasi kualitas air, pengawasan kualitas air,perbaikan kualitas air	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	-
71	Rekomendasi Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	-
72	Her registrasi SIUK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	-
73	Rekomendasi Pemadam Kebakaran	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	-
74	Rekomendasi Pengakuan sebagai perusahaan penampung terdaftar kayu olahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	-
75	Rekomendasi Pendirian Panti Sosial dan Yayasan yang bergerak di bidang sosial	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	-

 BUPATI BEKASI

 Hi NENENG HASANAH YASIN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 35 Tahun 2017

TANGGAL : 29 Agustus 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 98
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK
MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH DI
KABUPATEN BEKASI

PELIMPAHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

NO	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
				SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
1	Izin lokasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Luas kurang dari 10 Ha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Luas 10 Ha keatas oleh Bupati
2	Izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Luas kurang dari 10 Ha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Luas 10 Ha keatas oleh Bupati
3	Izin mendirikan bangunan (IMB) umum dan bangunan negara;	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
4	Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
5	Izin usaha jasa konstruksi (SIUJK)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
6	Izin undang-undang gangguan (HO)	dihapus	dihapus	dihapus	
7	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	dihapus	dihapus	dihapus	
8	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
9	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
10	Izin Lingkungan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
11	Izin kerja malam bagi tenaga kerja wanita (IKMW)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
12	Izin praktek Dokter Hewan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
13	Izin pendirian sekolah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
14	Izin peternakan, perikanan dan kelautan;	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
15	Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
16	Izin layak huni dan persewaan perumahan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
17	Izin pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) baik milik pemerintah ataupun milik perusahaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
18	Izin penimbunan bahan bakar cair	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
19	Izin pemanfaatan limbah non B3 yang bernilai ekonomis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

NO	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
				SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
20	Izin usaha bengkel alat dan mesin Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
21	Izin usaha obat hewan ditingkat depo toko kios dan pengecer	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
22	Izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan, perikanan dan kelautan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
23	Izin rumah potong hewan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
24	Izin produksi bibit hewan & ikan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
25	Izin Tempat Pelelangan Ikan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
26	Izin usaha kawasan industri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
27	dihapus	dihapus	dihapus	dihapus	
28	Izin perparkiran diluar badan jalan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
29	Izin pendidikan dan latihan luar sekolah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
30	Izin kegiatan kebudayaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
31	Izin pengelolaan air kotor dan lumpur tinja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
32	Izin Optical	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
33	Izin Toko Obat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
34	Izin Usaha Jasa Boga (Catering)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
35	Izin tempat pengelolaan makanan dan tempat-tempat umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
36	Izin Klinik Kebugaran	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
37	Izin Salon Kecantikan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
38	Izin industri kosmetik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
39	Izin Tukang Gigi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
40	Izin pengobatan tradisional	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
41	Izin Bapel JPKM	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
42	Izin industri obat tradisional	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
43	Izin lembaga perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Swasta (LPPKS)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

NO	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
				SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
44	Izin pemakaian pesawat uap	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
45	Izin pemakaian bejana tekanan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
46	Izin pemakaian pesawat angkut	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
47	Izin pemakaian motor diesel	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
48	Izin instalasi listrik dan penyaluran petir	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
49	Izin penyimpangan waktu kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
50	Izin usaha angkutan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
51	Izin Bongkar Muat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
52	Izin Pemasangan Reklame	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Luas 10 M keatas oleh Bupati
53	Izin Prinsip Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
54	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
55	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
56	Izin Usaha Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
57	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
58	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
59	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
60	Izin peruntukan penggunaan tanah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
61	Izin gudang bahan peledak	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
62	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
63	Izin pengumpulan, penyimpanan sementara dan lokasi pengolahan limbah B3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
64	Izin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
65	Izin tempat pembuangan akhir sampah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
66	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
67	Izin Toko Swalayan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Izin Toko Swalayan dengan Luas kurang 2000 Meter oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Luas 2000 M keatas oleh Bupati

NO	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
				SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
68	Izin pengelolaan sampah pasar tradisional	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
69	Izin pemeliharaan prasarana dan sarana pasar dan kebersihan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
70	Izin hak guna pakai bangunan di lingkungan pasar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
71	Izin dan retribusi di bidang kebersihan pasar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
72	Pemberian dan pengawasan ijin sewa beli	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
73	Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengencer/penjual langsung minum di tempat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
74	Izin penggunaan ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	
75	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
76	Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili di Kabupaten Bekasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
77	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan Beroperasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
78	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang per orang Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
79	Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk kapal yang melayani trayek dalam kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
80	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
81	Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
82	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pemungkiman lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
83	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
84	Izin usaha badan usaha	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
85	Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
86	Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam pelabuhan pengumpulan lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
87	Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
88	Izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkereta apian umum yang jaringannya dalam satu daerah kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
				SKPD	BUPATI/WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
89	Izin Operasi sarana pekereta api umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam satu daerah kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
90	Izin pengadaan atau pembangunan perkereta apian khusus	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
91	Izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
92	Izin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
93	Izin trayek angkutan kota/pedesaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
94	Izin operasi Taksi yang melayani wilayah Kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
95	Izin usaha penyelenggaran sekolah/ pendidikan dan latihan mengemudi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
96	Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (log pond) jaring terapung dan keramba di	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
97	Izin pembangunan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api Kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
98	Izin dispensasi penggunaan jalan bukan peruntukannya	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
99	Izin penggunaan jalan di luar kepentingan lalu lintas;	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
100	Izin perparkiran di badan jalan (on street)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
101	Izin penyelenggaraan perbengkelan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
102	Izin penyelenggaraan pool kendaraan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
103	Izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
104	Izin kegiatan penggerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
105	Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
106	Izin kegiatan penggerukan di DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
107	Izin kegiatan reklamasi di DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
108	Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
109	Izin usaha pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
110	Izin usaha tally di pelabuhan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
				SKPD	BUPATI/WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
111	Izin usaha bongkar muat dari dan ke kapal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
112	Izin usaha ekspedisi / freight forwarder	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	
113	Izin jasa titipan untuk kantor agen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
114	Izin penyelenggaraan komunikasi tidak menggunakan spektrum frekwensi radio	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
115	Izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G).	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
116	Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
117	Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
118	Izin hinder dan ordonatie (Ordonasi gangguan frekwensi)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
119	Izin instalasi penangkal petir	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
120	Izin instalasi genset	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
121	Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
122	Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan atau televisi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
123	Izin pengguna spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
124	perizinan penjualan laser disk VCD dan DVD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
125	pemberian izin mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
126	Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
127	izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan /atau televisi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
128	izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
129	Perizinan pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
130	Izin pemanfaatan Damaja, Damija, dan Dawasa untuk jalan nasional jalan propinsi, dan jalan kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

NO	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
				SKPD	BUPATI/WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
131	Izin pembangunan jalan Tol di dalam Kabupaten (Non lintas Kabupaten)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
132	Izin mendirikan, mengubah, membongkar bangunan yang melintasi saluran irigasi yang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
133	Izin mendirikan, mengubah, membongkar bangunan yang melintasi saluran irigasi yang seluruh jaringan irigasi berada dalam satu Kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
134	Izin operasi kapal keruk/kapal hisap	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
135	Izin pelayanan umum di bidang pertamanan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
136	Izin pelayanan umum di bidang pemakaman	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
137	Izin praktik psikologi ketenagakerjaan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
138	Izin tempat penampungan TKI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
139	Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
140	Izin lembaga pelatihan kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
141	Izin penempatan tenaga kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
142	Izin pelatihan dan peningkatan produktivitas kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
143	Izin usaha perluasan kesempatan kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
144	Izin bursa kerja khusus (BKK)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
145	Izin Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
146	Izin penampungan Tenaga Kerja Indonesia	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
147	Izin Lembaga Pemagangan dalam negeri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
148	Izin pelatihan sambil bekerja ke luar negeri	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
149	Izin LPK dan pelatihan lainnya yang non kurikuler Departemen Pendidikan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
150	Izin pemakaian instalasi penyalur petir di tempat kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
151	perizinan penyelenggaraan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
152	izin dan pendaftaran lembaga pelatihan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	

NO	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
				SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
153	izin operasional tenaga kerja sukarela (TKS) luar negeri, TKS Indonesia , lembaga suka rela indonesia	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
154	izin pendirian kantor cabang PPTKIS	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
155	Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
156	izin pendirian lembaga bursa kerja/LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
157	perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	
158	Izin praktek perorangan dokter umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
159	Izin praktek perorangan dokter gigi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
160	Izin praktek berkelompok dokter umum	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
161	Izin praktek berkelompok dokter gigi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
162	Izin balai pengobatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
163	Izin rumah bersalin	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
164	Izin praktek bidan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
165	Izin praktek perawat gigi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
166	Izin praktek perorangan dokter spesialis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
167	Izin praktek perorangan dokter gigi spesialis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
168	Izin praktek berkelompok dokter spesialis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
169	Izin praktek berkelompok dokter gigi spesialis	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
170	Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
171	Izin Klinik Radiologi Swasta Perorangan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
172	Izin Laboratorium Kesehatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
173	Izin Apotik dan Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
174	Izin Klinik Fisioterapi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
175	Izin Industri Farmasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	

NO	JENIS PERIZINAN	KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	
				SKPD	BUPATI/ WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5	6
176	Izin Pedagang Besar Farmasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
177	Izin Industri Alat Kesehatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
178	Izin Pest Kontrol	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
179	Izin Industri Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
180	Izin praktik tenaga kesehatan tertentu	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
181	Izin PBF Cabang , PBAK dan Industri kecil obat tradisional (IKOT)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
182	Izin makanan serta minuman industri rumah tangga (PIRT)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
183	Izin usaha di bidang pengobatan tradisional	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
184	Izin benda cagar budaya dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya dalam satu propinsi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	
185	Izin Usaha Pertanian	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	
186	Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	
187	Izin usaha pengecer(toko, retail, sub distributor) obat hewan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	
188	Izin Pelayanan umum di bidang holtikura	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	
189	Izin Usaha Industri Kecil dan Izin perluasannya	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN	
190	Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Perluasannya	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN	
191	Izin pendirian dan usulan penutupan Universitas / Institut/ Sekolah Tinggi dan Politeknik Negeri dan Swasta	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	
192	Izin bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan fasilitasi pembayaran serta simpan pinjam	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
193	Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kerjasama kabupaten	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	
194	Izin Usaha budidaya ikan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PFRIKANAN DAN KELAUTAN	DINAS PFRIKANAN DAN KELAUTAN	

BUPATI BEKASI

A. HJ. NENENG HASANAH YASIN